

PENERAPAN SAK ETAP PADA KELOMPOK PEMUDA TANI (KPT) TUNAS MAKMUR DESA KLAMPOK KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Apta Widodo Hartama / 200912014 / Akuntansi

STIE Indonesia Banking School, Jakarta

ABSTRACT

According to the statements from IAI, the agricultural sector of Small and Medium Enterprises (SMEs) is the most appropriate for the alleviation of poverty and developed immunity to the nation and the global financial crisis to reduce urbanization. There are many organizations and groups onion farmers both active and inactive in district of Brebes, there are 54 agricultural cooperatives are not active on the total of 58 cooperatives. The purpose of this research is to determine the understanding onion farmers in the district of Brebes on the recognition, measurement, presentation and disclosure in the financial statements and to determine the suitability of accounting standards on the financial statements of onion farmers by SAK ETAP.

Law No.17 of 2012 regarding cooperatives explained that cooperatives should be able to explain the use of funds derived from capital cooperative members through financial statements. This is a qualitative study. Data is collected by doing field research and library research then analysed descriptively. Analysis by conducting interviews on the board and see the entities shoots prosperous financial statements dis ach account created to comply with the provisions SAK ETAP.

Based on the analysis and discussion of the proposed formulation of the problem is that the results obtained two prosperous shoots the entities is not understand about aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure due to lack of human resources who know the knowledge of accounting. Level of compliance with the financial statements SAK ETAP still very low as in the recognition and measurement of fixed assets and inventory, presentation and disclosure of liabilities and expenses.

Keywords : SAK ETAP, SMEs, Financial Statements, Cooperatives

I. PENDAHULUAN

UMKM mempunyai potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi serta menjadi sumber utama pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kristanto, 2011). Di kota-kota kecil dan pedesaan, UMKM memegang peranan penting dalam memberdayakan penduduk lokal dengan bekerja sebagai pegawai maupun buruh. Kuliah Umum di IBS (Jum'at, 23 Desember 2011) dengan pembicara Bapak Jan Hoesada dari IAI, menjelaskan bahwa UMKM sektor pertanian merupakan sektor paling tepat untuk dikembangkan dalam pengentasan kemiskinan dan imunitas bangsa terhadap krisis moneter global serta mengurangi arus urbanisasi ke kota.

Terdapat 4 koperasi pertanian yang masih aktif di Kabupaten Kebumen dari total 58 koperasi dan terjadi sudah lama dikarenakan berbagai faktor seperti hilangnya hak prerogatif untuk menjual pupuk dan obat hama, lemahnya manajemen dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran untuk membuat usaha bersama (suaramerdeka.com). Hal yang sama terjadi di Kabupaten Brebes, sebagian besar koperasi tani menutup usahanya.

Ervillia (2009) banyak UMKM yang tidak mengetahui cara pembuatan laporan keuangan, sehingga menjadi kendala dalam pengajuan pinjaman dana. Menurut Wahdini dan Suhairi (2006) standar akuntansi yang digunakan terlalu banyak dan menyulitkan UMKM untuk menyusun laporan keuangan, sehingga memberatkan (*overload*).

Keterbatasan yang dihadapi UMKM salah satunya latar belakang pendidikan yang tidak mengenal akuntansi, oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan berlaku efektif per 1 Januari 2011 (IAI, 2011).

Paragraf 1.1 (b) SAK ETAP menyebutkan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur dan serta lembaga pemeringkat kredit. Maka dari itu kelompok petani bawang merah dapat menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi mereka. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana SAK ETAP di terapkan pada sektor usaha koperasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP untuk UMKM.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan suatu hasil studi mengenai penerapan SAK ETAP berdasarkan pemahaman dan aturan KPT Tunas Makmur dari aspek kuantitatif yaitu dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
2. Mengetahui berdasarkan hasil tinjauan secara langsung mengenai kesesuaian antara standar akuntansi pada laporan keuangan KPT Tunas Makmur dengan SAK ETAP.

II. LANDASAN TEORITIS

2.1 Peran Penting Standar Akuntansi

Peran penting dari adanya standar akuntansi menurut Harahap (2011:154) adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan.
2. Memberi pedoman dan peraturan bagi akuntan publik.
3. Memberikan data base kepada regulator tentang berbagai informasi.
4. Menarik perhatian para ahli dan praktisi untuk melakukan penelitian.

2.2 Standar Akuntansi di Indonesia

Menurut Martani (2011) standar akuntansi yang berlaku dan digunakan di Indonesia saat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (berbasis IFRS); Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah); dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.3 Pengertian SAK ETAP

Terdapat pada SAK ETAP Paragraf 1.1 menjelaskan bahwa : Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah entitas yang :

1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha seperti pemerintah daerah, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

2.4 Karakteristik SAK ETAP

Karakteristik SAK ETAP menurut IAI (2011) adalah sebagai berikut :

1. *Stand Alone Accounting Standard* (tidak mengacu ke SAK umum).
2. Mayoritas menggunakan *historical cost concept*.
3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil dan menengah.
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK non-ETAP.
5. Tidak akan berubah selama beberapa tahun.

2.5 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

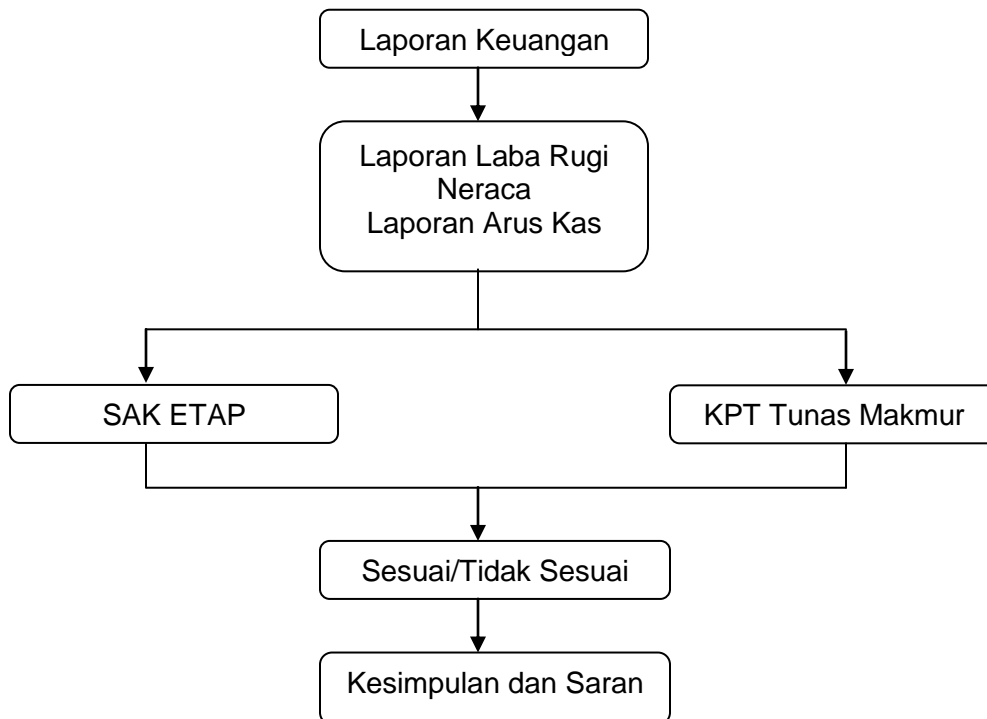
bersama ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (UU No.17 Tahun 2012).

2.6 Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP

Laporan keuangan entitas menurut SAK ETAP (2009) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

2.7 Rerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Analisis Peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Koperasi tani Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur yang juga mempunyai usaha bersama anggota dan pengurusnya di pertanian bawang merah, padi, serta pertanian sayuran dan hortikultura lainnya. Koperasi tani KPT Tunas Makmur dipilih karena salah satu koperasi tani yang masih aktif dan merupakan salah satu pelopor terbentuknya kelompok pemuda tani di Kabupaten Brebes. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 30 januari 2013 dan berlanjut sampai dengan proses tahap akhir pengumpulan data dan analisis bulan Juni 2013.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat penerapan SAK ETAP berdasarkan aspek kuantitatif yaitu dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dari sisi laporan keuangan yang telah disusun oleh KPT Tunas Makmur apakah standar akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian. Data sekunder ini diambil dari SAK ETAP serta peraturan undang-undang, buku, jurnal serta artikel lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Data primer di penelitian ini diperoleh pada saat peneliti menggali informasi yang dibutuhkan dan relevan melalui teknik wawancara kepada pengurus koperasi tani KPT Tunas Makmur serta melakukan analisis laporan keuangan yang sebelumnya telah dilakukan tinjauan langsung selama empat periode berdasarkan akan dimulainya proses akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan.

3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mengacu pada SAK ETAP 2009 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memuat materi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan oleh perusahaan kecil / UMKM / Koperasi. Kemudian peneliti akan membandingkan dan melakukan analisis standar akuntansi yang digunakan oleh Koperasi Tani apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP.

Data yang dibandingkan adalah data yang didapat dari tinjauan langsung ke Koperasi Tani di Desa Klampok Brebes dengan aturan di SAK ETAP. Kemudian peneliti dapat mengetahui jumlah item-item yang sudah sesuai dengan standar dan item-item mana saja yang tidak sesuai sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk berbagai pihak terutama IAI selaku penerbit standar akuntansi, KPT Tunas Makmur selaku pengguna dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, Akademisi dan BPS.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Aspek Kuantitatif

1. Pengakuan

Pengakuan kas pada saat terjadi transaksi yang manfaat ekonominya akan mengalir di masa depan. Pengakuan persediaan terjadi ketika ada barang yang masuk dan yang keluar, contohnya ketika pembelian dan penjualan bibit. Pengakuan aset tetap pada saat entitas membeli atau memperoleh aset tetap dari kegiatan transaksi, contohnya pada saat entitas membeli kendaraan dan diakui sebagai aset tetap entitas sebesar biaya perolehan. Entitas tidak mengakui adanya beban penyusutan karena kurangnya pemahaman. Menurut Bendahara KPT menjelaskan bahwa pengakuan hutang usaha pada saat jatuh tempo sedangkan pengakuan modal KPT berdasarkan pada modal pokok dari iuran wajib dan iuran sukarela anggota.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, pengakuan saldo laba adalah pada saat entitas memperoleh keuntungan bersih atas kegiatan usaha. Entitas mengakui pendapatan ketika terjadi penjualan barang dan diakui menggunakan dasar *cash basis*. Pengakuan beban menggunakan dasar *cash basis* yaitu beban diakui sebesar kas yang dikeluarkan untuk menyelesaikan beban.

2. Pengukuran

Pengukuran kas menggunakan metode biaya historis dan tidak diukur dengan nilai wajar, contoh pada saat pembelian bibit, entitas menggunakan biaya satu hari sebelumnya padahal keesokan harinya harga bibit berubah. Pengukuran persediaan berdasarkan nilai perolehan barang pada saat pertama kali. Aset tetap diakui di awal sebesar biaya perolehan, setelah itu entitas melakukan pengukuran terhadap biaya pemeliharaan disesuaikan dengan biaya historis. Pengukuran kewajiban didasarkan atas biaya historis yang dicatat sebesar kas yang diterima atau yang dikeluarkan sedangkan pengukuran modal KPT diukur sebesar jumlah uang kas atau non kas yang diterima.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, pengukuran saldo laba sebesar total pendapatan entitas setelah dikurangi dengan semua beban sedangkan pengukuran pendapatan sebesar nilai wajar yang disesuaikan dengan kondisi dan harga pasar karena setiap harinya harga barang selalu berubah.

Tetapi untuk pengukuran beban sebesar biaya historis tidak disesuaikan dengan nilai wajar seperti pada saat membayar beban gaji.

3. Penyajian

Kas dan persediaan disajikan pada pos tersendiri di Neraca laporan keuangan sedangkan kewajiban pada sisi pasiva. Penyajian aset tetap sebesar pengakuan awal pada biaya perolehan dan tidak ada penyajian akumulasi penyusutan asset tetap. Penyajian modal pada neraca sesuai dengan besarnya modal dan penambahan modal pada periode tertentu sedangkan pendapatan yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pos-pos di laporan laba rugi, pemahaman tentang aspek penyajian masih sangat rendah seperti pada tidak adanya pemisahan batas penyajian saldo laba yang dibagikan dan yang dilaporkan sebagai dalam bentuk cadangan modal, tidak ada pemisahan penyajian pendapatan untuk pos-pos yang material dan tidak ada penyajian terpisah berdasarkan analisis fungsi dan sifat beban menunjukkan pemahaman yang masih kurang tentang aspek penyajian.

4. Pengungkapan

Entitas tidak melakukan pengungkapan mengenai komponen kas dan rekonsiliasi jumlah kas serta pengungkapan kebijakan yang dipakai entitas dalam mengukur persediaan dan tidak ada tambahan informasi mengenai persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Pada aset tetap, tidak ada pengungkapan mengenai estimasi umur manfaat, metode penyusutan dan rekonsiliasi jumlah awal dan akhir. KPT memang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi pengungkapan tambahan informasi mengenai kewajiban dan modal KPT sedangkan perubahan modal hanya dicatat pada besarnya modal berjalan.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, penjelasan mengenai saldo laba hanya pada laporan laba rugi dan tidak terdapat pengungkapan atas koreksi masa lalu. Pemahaman KPT dari aspek pengungkapan sangat rendah tercermin dari tidak ada informasi tambahan yang mampu menjelaskan bagaimana pengungkapan pendapatan, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifatnya.

4.2 Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan SAK ETAP

1. Kas dan setara kas

Tabel 4.1 Kas dan Setara Kas SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan :</p> <p>- 2.34 Aset diakui didalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.</p>	<p>Kas diakui dalam neraca sebesar nilai nominal pada transaksi, kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP, kas yang mengalir dimasa depan akan memberikan manfaat ekonomi.</p>
<p>Pengukuran :</p> <p>2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar.</p> <p>- Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.</p> <p>- Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban.</p>	<p>Pengukuran kas menggunakan biaya historis sebesar kas yang dibayarkan atau yang diterima pada saat terjadinya transaksi.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena kas diukur hanya berdasarkan biaya historis sejumlah kas yang dibayarkan dan tidak berdasarkan nilai wajar sejumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban. Contoh pada saat entitas pembelian bibit yang menggunakan biaya historis, sedangkan nilai wajar barang berubah setiap saat.</p>
<p>Penyajian :</p> <p>- 4.2 Minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas</p> <p>- 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.</p>	<p>Kas disajikan pada pos tersendiri pada laporan keuangan.</p>	<p>Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak mencakup pos-pos minimal serta tidak dapat menyajikan klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>
<p>Pengungkapan :</p> <p>7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.</p>	<p>KPT menghitung kas keluar dan masuk saja tidak ada catatan atas laporan keuangan</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas hanya menyajikan laporan kas masuk dan keluar, tidak dapat menyajikan rekonsiliasi secara keseluruhan.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

2. Persediaan

Tabel 4.2 Persediaan SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 11.17 Jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dan pendapatan terkait diakui</p>	<p>Penjualan persediaan diakui sebagai pendapatan beban periode.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena pada saat persediaan dijual akan diakui sebagai pendapatan dan beban. Contoh penjualan bibit, sejumlah bibit yang terjual diakui sebagai pendapatan dan biaya transportasi untuk mengangkutnya diakui sebagai beban.</p>
<p>Pengukuran : 11.3 Mengukur nilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi biaya penyelesaian untuk mendapatkan persediaan.</p>	<p>Persediaan diukur pada nilai perolehan saja.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena persediaan diukur dengan biaya perolehan. Contoh pada saat pembelian persediaan diukur sesuai dengan biaya perolehan, entitas tidak mengukur adanya biaya penyelesaian.</p>
<p>Penyajian : - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.</p>	<p>KPT menyajikan persediaan dan aset lancar lainnya</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, entitas tidak mencakup pos-pos minimal dan tidak ada klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>
<p>Pengungkapan : 11.19 Menjelaskan kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan, total persediaan yang tercatat dan klasifikasi, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode.</p>	<p>Entitas mengungkapkan kebijakan untuk mengukur persediaan dengan metode FIFO</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak memenuhi syarat yang harus diungkapkan yaitu tidak menggunakan rumus biaya dan tidak menjelaskan jumlah persediaan, total persediaan yang tercatat.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

3. Aset Tetap

Tabel 4.3 Aset Tetap SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan - 15.17 Beban penyusutan harus diakui oleh entitas - 15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap. - 22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset kurang dari jumlah tercatatnya, maka entitas harus menurunkan jumlah tercatat aset pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan diakui sebagai rugi penurunan nilai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan - KPT tidak mengakui beban penyusutan aset tetap. - Se jauh ini KPT tidak melakukan penghentian pengakuan aset. - Aset tetap masih digunakan untuk kegiatan di KPT dan tidak ada aset yang dijual 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengakui penyusutan aset tetap yang seharusnya diakui tiap tahun selama periode berjalan.</p>
<p>Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.14 Diakui sebesar biaya perolehan dengan prinsip biaya historis, penyusutan diakui sebagai beban. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan sehari-hari (<i>cost of day to day servicing</i>) sebagai beban pada laporan laba rugi 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap diukur berdasarkan biaya historis pada saat awal pembelian - KPT mengukur biaya pemeliharaan sehari-hari sebagai beban dari biaya transportasi - KPT tidak mengukur besarnya akumulasi penyusutan aset tetap 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, entitas mengukur biaya perawatan sehari-hari sebagai beban pada laporan laba rugi tetapi entitas tidak menghitung biaya penyusutan aset tetap dan tidak mengukur nilai dari awal sampai akhir periode</p>
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.14 Disajikan berdasarkan pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, estimasi kerugian penurunan nilai. - 17.12 Kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap disajikan sebesar pengakuan awal dengan biaya perolehan tanpa dikurangi biaya penyusutan dan estimasi kerugian penurunan nilai - KPT melakukan sewa aset tetap seperti sewa kendaraan tetapi tidak menyajikan pada aset tetap ataupun kewajiban 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena entitas hanya menyajikan perhitungan pada pengakuan awal saja dan tidak menyajikan perhitungan selama periode berjalan mengenai nilai aset tetap baik itu dari penyusutan maupun dari estimasi penurunan nilai di masa mendatang serta tidak menyajikan kewajiban sewa.</p>
<p>Pengungkapan :</p> <p>15.31 Menjelaskan dasar pengukuran aset tetap dan inventaris, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, rekonsiliasi jumlah awal dan akhir periode dan penurunan nilai</p>	<p>KPT tidak melakukan dasar pengukuran aset tetap serta estimasi umur manfaat, KPT hanya menggunakan aset tetap untuk kegiatan dan tidak menjelaskan rekonsiliasi aset tetap dari awal hingga periode akhir.</p>	<p>Tidak sesuai SAK ETAP karena tidak ada penjelasan mengenai penghitungan nilai (rekonsiliasi) awal hingga akhir periode dan tidak melakukan penghitungan atas beban penyusutan dan penurunan nilai</p>

Sumber : Analisis Peneliti

4. Kewajiban

Tabel 4.4 Kewajiban SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 2.35 Kewajiban diakui di neraca jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur dengan andal.</p>	<p>Kewajiban diakui pada saat kewajiban jatuh tempo dan sumber daya dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena kemungkinan pengeluaran sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban masa kini.</p>
<p>Pengukuran : 2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. - Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima sebagai penukar kewajiban. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban</p>	<p>Pengukuran menggunakan biaya historis dari transaksi atau peristiwa masa lalu, aset telah diserahkan atau entitas telah membuat perjanjian sebesar kas yang diterima sebagai penukar kewajiban pada saat terjadi.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas hanya mengakui kewajiban berdasarkan biaya historis pada saat terjadinya kesepakatan transaksi dan tidak mengakui sebesar nilai wajar.</p>
<p>Penyajian : - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.</p>	<p>- Penyajian oleh KPT tidak mencakup pos-pos minimal yang disyaratkan - Entitas tidak menyajikan pemisahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena masih belum mencakup pos-pos minimal serta tidak terdapat klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>
<p>Pengungkapan : - 2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi</p>	<p>- Kewajiban diselesaikan dengan pembayaran kas sebesar jumlah yang harus diselesaikan. - KPT tidak membuat catatan atas laporan keuangan</p>	<p>Tidak Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan jumlah kewajiban yang dilunasi dan kewajiban yang masih harus diakui baik jangka pendek maupun jangka panjang</p>

sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.		
---	--	--

Sumber : Analisis Peneliti

5. Modal

Tabel 4.5 Modal SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyisihan hasil usaha - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima	- Modal pokok berasal dari iuran wajib dan iuran sukarela anggota. - Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan uang yang diterima	Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena modal yang diakui adalah modal pokok dari iuran wajib dan iuran sukarela serta modal disetor
Pengukuran : - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyisihan hasil usaha - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima	Modal diukur sebesar jumlah uang kas yang diterima serta penambahan modal baik berupa kas maupun asset non kas.	Sudah sesuai SAK ETAP karena KPT menghitung modal dari kas yang diterima dan penambahan modal disetor
Penyajian : - 19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. - 19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dinyatakan dalam neraca.	- Modal disajikan tidak berdasarkan akta pendirian - Modal disajikan sesuai dengan besarnya modal berupa uang tunai yang terkumpul pada periode tertentu.	Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak menyajikan modal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada saat pendirian KPT.
Pengungkapan : - 19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. - 19.35 Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba dilakukan secara terpisah sesuai perubahan selama periode pelaporan - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi	- Perubahan modal hanya dicatat pada besarnya modal berjalan dan tidak diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. - Saldo laba disajikan pada pos modal tetapi nilainya terpisah dari modal. - KPT tidak membuat catatan atas laporan keuangan.	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak adanya penghitungan dan rincian klasifikasi modal. Entitas tidak menampilkan secara terpisah antara modal dan saldo laba serta tidak ada alokasi laba ditahan. Laba ditahan, perubahan modal tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

yang disajikan dalam laporan keuangan.		
--	--	--

Sumber : Analisis Peneliti

6. Saldo Laba

Tabel 4.6 Saldo Laba SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : 19.19 Bila dividen/keuntungan dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan	Dividen/keuntungan dalam bentuk kas diakui sebesar nilai wajar	Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena pembagian keuntungan/dividend dalam bentuk kas sebesar nilai wajar. Contoh pada saat pembagian dividen keuntungan dibagikan dalam bentuk kas kepada para anggota.
Pengukuran : 19.20 Pembagian dividen/keuntungan berasal dari saldo laba yang diinvestasikan kembali oleh anggota dalam bentuk modal disetor	Dividen / keuntungan dibagikan ke anggota sebesar kas yang tersisa di saldo laba	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena deviden/keuntungan yang dibagikan ke anggota berasal dari sisa saldo laba dan tidak diinvestasikan kembali dalam bentuk modal disetor
Penyajian : 19.28 Saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai pembagian keuntungan deviden sedangkan saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai deviden dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan.	Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan yang dinyatakan terpisah dari modal dan dibagikan sebagai keuntungan hasil usaha para anggota.	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada pemisahan batas antara saldo laba yang dibagikan dan yang dilaporkan sebagai pencadangan modal.
Pengungkapan: 19.30 Pengungkapkan penjatahan dan pemisahan saldo laba. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba. Koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak.	Tidak ada koreksi masa lalu yang mencerminkan pengungkapan saldo laba dan tidak terdapat pemisahan saldo laba	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan pemisahan saldo laba dan koreksi masa lalu.

Sumber : Analisis Peneliti

7. Pendapatan Operasional

Tabel 4.7 Pendapatan SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : - 20.1 Pendapatan muncul sebagai akibat dari transaksi penjualan barang - 2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam	- Pendapatan utama yang diakui dari penjualan - Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi	Sudah sesuai dengan SAK ETAP, KPT mengakui adanya pendapatan pada saat terjadi transaksi penjualan barang dan terdapat kenikmatan manfaat ekonomi di masa depan.

laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.		
Pengukuran : 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Nilai wajar tidak termasuk jumlah diskon dan potongan.	Pendapatan KPT dinilai dari besarnya nilai wajar atas pembayaran yang diterima disesuaikan dengan kondisi pasar dan tidak menghitung adanya diskon dan potongan penjualan	Sudah sesuai dengan SAK ETAP, entitas mengukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima dari hasil penjualan barang dan tidak termasuk diskon dan potongan.
Penyajian : 3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabung dengan jumlah yang memiliki sifat dan fungsi sejenis.	Pendapatan dari penjualan disajikan pada laporan laba rugi dan laporan arus kas	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada pemisahan antara pos yang material dan yang tidak material. Contoh pendapatan penjualan bibit yang material digabung dengan pendapatan penjualan karung pembungkus bibit.
Pengungkapan : 20.28 Entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan termasuk metode yang diterapkan. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode timbul dari penjualan barang.	Tidak ada pengungkapan tentang kebijakan akuntansi sebagai dasar pengakuan pendapatan.	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar pengakuan pendapatan serta tidak ada penjelasan kategori pendapatan dari penjualan barang selama periode berjalan.

Sumber : Analisis Peneliti

8. Beban Operasional

Tabel 4.8 Beban Operasional SAK ETAP

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : 2.33 Beban diakui dalam laporan laba rugi. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.	KPT menggunakan dasar <i>cash basis</i> untuk pengakuan beban dimana beban diakui seluruhnya pada periode transaksi	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena semua beban diakui menggunakan dasar <i>cash basis</i> tidak adanya pemisahan beban berdasarkan sifat dan fungsinya.

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengukuran :</p> <p>2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya historis. Asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban 	<p>Pengukuran beban menggunakan biaya historis sebesar kas yang dikeluarkan untuk memperoleh beban dan kemungkinan mempunyai manfaat dimasa depan dapat</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena beban tidak diukur dengan nilai wajar melainkan hanya berdasarkan biaya historis sejumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh beban yang kemungkinan mempunyai manfaat dimasa depan.</p>
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.4 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan keuangan laba rugi - 5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberi informasi yang lebih andal dan relevan. 	<p>Beban operasional disajikan dalam laporan laba rugi dan menggabungkan semua beban</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada klasifikasi beban berdasarkan sifat dan fungsi beban.</p>
<p>Pengungkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.8 Entitas mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi pengungkapan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. - 28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut dan informasi transaksi saldo untuk memahami dampak potensialnya dengan laporan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - KPT tidak melakukan pengungkapan beban penyusutan dimasa lalu dan masa kini - Tidak ada transaksi pihak-pihak yang hubungan istimewa transaksi hanya melibatkan pengurus dan petani serta 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, tidak diperhitungkan beban penyusutan, sedangkan tiap tahunnya terjadi penurunan nilai yang menjadi beban dari KPT dan tidak mengungkapkan beban berdasarkan sifat dan fungsinya.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

9. Beban Pajak

Tabel 4.9 Beban Pajak SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan :</p> <p>24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.</p>	<p>KPT tidak mengakui adanya kewajiban atas pajak penghasilan</p>	<p>Tidak sesuai SAK ETAP karena entitas tidak mengakui beban pajak dan tidak mempunyai NPWP.</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengukuran : Diukur berdasarkan besarnya pendapatan dan beban tahun berjalan selama periode berjalan dan periode sebelumnya	KPT tidak melakukan penghitungan beban pajak yang harus dibayar	Tidak sesuai dengan SAK ETAP. Entitas tidak menghitung besarnya beban pajak
Penyajian : 3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis	Tidak terdapat penyajian beban pajak	Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP entitas tidak memahami adanya beban pajak
Pengungkapan : 24.4 Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.	Tidak terdapat pengungkapan beban pajak	Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP entitas tidak memahami adanya beban pajak

Sumber : Analisis Peneliti

Tabel 4.10 Ringkasan Kesesuaian pos-pos Laporan Keuangan KPT dengan SAK ETAP

No.	Nama Akun	Pengakuan	Pengukuran	Penyajian	Pengungkapan
1	Kas	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
2	Persediaan	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
3	Asset Tetap	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
4	Kewajiban	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
5	Modal	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
6	Saldo Laba	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
7	Pendapatan Operasional	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
8	Beban Operasional	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
9	Beban Pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak
Jumlah yang sesuai		6/9	2/9	0/9	0/9

Sumber : Analisis Peneliti

4.3 Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

KPT selaku koperasi pertanian yang ada di desa membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana dan modal yang ada di KPT. Laporan keuangan yang dibuat rutin setiap bulan adalah laporan kas keluar dan kas masuk seperti pada penelitian Anna (2011).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman KPT masih sangat rendah mengenai aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dan KPT tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kristanto (2011) dan Susanto (2011) bahwa entitas tidak dapat menyajikan dan menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan akuntansi menjadi kendala utama untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian Putra (2012) dan Kristanto (2011). Selain itu pelaku usaha tidak mengenal adanya SAK ETAP menjadi kendala seperti pada penelitian Auliyah (2012).

Perbedaan dengan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah peneliti menelusuri lebih dalam tentang pemahaman objek penelitian tentang laporan keuangan dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hasil penelitian yang kedua adalah tingkat kesesuaian dengan SAK ETAP yang masih sangat rendah, berbeda dengan penelitian Kaparang (2012) hanya terdapat beberapa akun yang belum sesuai dengan SAK ETAP pada praktik akuntansi di BPR.

Berbeda dengan hasil penelitian Anna (2011) yaitu UMKM yang mendapatkan bantuan dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya mampu membuat laporan keuangan yang lengkap, sedangkan pada penelitian ini laporan keuangan yang disusun oleh KPT dapat dikatakan masih sederhana, hanya dengan memasukkan pos-pos yang ada dan tidak melakukan klasifikasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikemukakan, berikut kesimpulan dari penelitian ini :

1. Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur belum memahami tentang prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi menyebabkan KPT belum mampu untuk menyusun laporan keuangan dengan baik.
2. Tingkat kesesuaian dalam menyusun laporan keuangan KPT Tunas Makmur dengan SAK ETAP masih sangat rendah, yang dimungkinkan beberapa kendala seperti tidak ada sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK ETAP yang

menyebabkan petani tidak mengetahui informasi dan aturan untuk menerapkan SAK ETAP. Dibandingkan dengan aturan di SAK ETAP, beberapa prinsip akuntansi yang tidak sesuai diantaranya yaitu tidak ada pengakuan beban penyusutan serta penurunan nilai aset tetap, KPT tidak menyajikan klasifikasi kewajiban yang harus diselesaikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal pengungkapan, tidak ada tambahan informasi mengenai kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan, total persediaan yang tercatat dan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Selain itu, KPT tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan informasi mengenai hutang usaha, modal, rekonsiliasi kas dan pengungkapan kebijakan akuntansi yang dipakai sebagai dasar pengakuan pendapatan, beban serta dasar pengakuan aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk KPT Tunas Makmur
 - a. KPT memperhatikan pentingnya peran laporan keuangan yang baik dan benar sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan serta pengambilan keputusan.
 - b. Tingkat kesesuaian akun-akun laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku masih sangat rendah, diharapkan KPT untuk meningkatkan pemahaman tentang standar akuntansi sehingga suatu saat nanti dapat menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya pengakuan dan pengukuran aset tetap yang harus mengakui beban penyusutan dan penurunan nilai aset tetap. Selain itu KPT harus meningkatkan pemahaman tentang pajak, karena KPT sebagai koperasi berbadan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
2. Untuk Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak akademis untuk membantu mensosialisasikan peran penting akuntansi dan laporan keuangan dalam kegiatan usaha.

- b. Melalui program pelatihan tentang SAK ETAP diharapkan Pemerintah Daerah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan aktif untuk membantu mewujudkannya penerapan SAK ETAP di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah sesuai dengan tujuan dibentuknya SAK ETAP.
 - c. BPS Kabupaten Brebes lebih aktif untuk mendapatkan data informasi dan laporan keuangan di bidang pertanian yang sangat dibutuhkan Pemerintah dalam menentukan pemberian subsidi dan program pertanian di Indonesia.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
- a. Melakukan penelitian pada UMKM yang sudah menerapkan SAK ETAP.
 - b. Melakukan tinjauan penelitian tentang faktor yang menjadi kendala dan mempengaruhi penerapan SAK ETAP dan dampak dari sebelum dan sesudah UMKM menerapkan SAK ETAP.
 - c. Menyajikan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan SAK ETAP

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Yane, Devi. 2011. **Analisis Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah-Sentra Industri Kaos di Jawa Barat.** Seminar Nasional “Perkuatan UMKM sebagai *Leading Sector* Perekonomian Indonesia”. 1 Oktober 2011. Malang. FEB-UMM.
- Auliyah, Iim Ma’rifatul. 2012. **Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik di Sidoarjo.** Artikel Ilmiah Program Sarjana. STIE Perbanas Surabaya
- Edwin et al. 2012. **IFRS for SMEs untuk Usaha Kecil Menengah atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.** Badan Penerbit Indeks. Jakarta
- Ervillia, Puspa. 2009. **Analisis Perumusan dan Penerapan Sistem Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UKM Waroeng Cokelat Bogor).** Skripsi program Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Harahap, Sofyan S. 2011. **Teori Akuntansi (Edisi Revisi 2011).** Badan Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Hariwijaya M. dan Triton P.B. 2011. **Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis.** Badan Penerbit Oryza. Yogyakarta.
- Hariyadi, Rinto. **54 Koperasi Pertanian Tidak Aktif dari Total 58 Koperasi.** Jum’at, 22 Maret 2013. <http://suaramerdeka.com>
- Hoesada, Jan. 2011. **SAK ETAP dan Implementasi pada Industri Perbankan.** Kuliah Umum Akuntansi. 23 Desember 2011. STIE Indonesia Banking School
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.** Ikatan Akuntan Indonesia. Mei 2009. Jakarta.
- , Yakub. 2011. **Implementasi SAK ETAP.** Ikatan Akuntan Indonesia. Desember 2011. Jakarta

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. **Standar Akuntansi Keuangan**. Ikatan Akuntan Indonesia. Januari 2012. Jakarta
- , Hoesada, Jan. 2010. **Implementasi SAK ETAP : Sumber Daya Peluang dan Tantangan**. Kongres XI "Instropeksi dan Transformasi Profesi Akuntan Menuju IAI 2020: Peran Akuntan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional". 9 Desember 2010. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kaparang, Vica Wilani Putri. 2012. **Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Praktik Akuntansi Perbankan BPR (Studi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya)**. Skripsi Program Sarjana. STIE Indonesia Banking School.
- Kristanto, Eri. 2011. **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Rotan Di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo**. Skripsi Program Sarjana. Universitas Sebelas Maret.
- Putra, Hermon Adhy dan Kurniawati, Elisabeth. 2012. **Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis SAK ETAP**. Pekan Ilmiah Dosen FEB. 14 Desember 2012. Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Schroeder, Richard G et all. 2011. **Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases**. 10th Edition. Wiley
- Sekaran, Uma. 2011. **Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1**. Badan Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, Uma and Bougie Roger. 2010. **Research Methods for Busines ; A Skill Building Approach**. 5th edition. Arthabook, Wiley
- Suhairi dan Wahdini. 2006. **Persepsi Akuntan terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi Usaha Kecil dan Menengah**. Simposium Nasional IX Padang: 23-25 Agustus.
- Susanto, Edi. 2011. **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Studi Kasus)**. Skripsi Program Sarjana. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian**. <http://www.depkop.go.id/>